

## **Kemiskinan, Gender, dan Covid-19 Jatim: *Feminization of Poverty, Multiple Pandemic, and Feminization of Pandemic***

**Zulfakhri Auzar**

PT Kedata Indonesia Digital

Email korenspondensi: zulfakhriauzar@gmail.com

---

### **Abstract**

*Poverty is significantly related to gender issues. For this intertwined relation, a concept called the feminization of poverty is established. East Java is the second biggest country's economy. However, this tremendous economic capacity is not followed by other essential development measures such as poverty rate, gender empowerment, and gender development/equality. Thus, it is urgent to portrait these issues in this province and investigate the statistically empirical relation between poverty and gender measures. This is more relevant in Covid-19 time since this pandemic can be labeled as a significant disruption to the schedule of human development. Gender-themed discourse is also related to the pandemic topic, which brings us to a concept called the feminization of pandemic. This research has a primary question: do the feminization of poverty and pandemic happen in East Java so far? The portraits of poverty and gender will be explored, and the relation between them will be investigated. For this need, data used are poverty rate, gender empowerment measure (IDG), human development index of each gender (IPM Laki-Laki & IPM Perempuan), and gender development index (IPG). The data is a panel consisting of 38 regencies in East Java during 2012-2020. The year 2016 is not included since it is not available. In the context of the impact of the Covid-19 pandemic towards poverty and gender empowerment and development, those five proxy variables are compared between 2019 and 2020. Data is from the country's Central Bureau of Statistics. Data collection is through online documentation from its official websites, both level national and provincial. Tools of analysis are descriptive statistics, panel data regression, and t-test. This research concludes that the feminization of poverty and pandemic takes place in East Java. This research offers suggestions for both policymakers and researchers.*

*Keywords: poverty, gender, pandemic, covid*

### **Abstrak**

*Kemiskinan sangat terkait dengan isu gender. Sampai-sampai terbentuklah konsep yang bernama feminisasi kemiskinan. Jawa Timur merupakan kontributor ekonomi nomor dua di Indonesia. Namun, kapasitas ekonomi ini tidak selaras dengan kinerja dalam penanganan kemiskinan, keberdayaan gender, dan keterbangunan/ketimpangan gender. Dengan demikian, sebuah urgensi untuk memotret isu-isu ini di Jatim dan menginvestigasi relasi kemiskinan dengan gender. Terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini yang bisa dikatakan sebagai sebuah disrupsi terhadap upaya pembangunan kesejahteraan manusia. Diskursus mengenai feminisme juga terkait dengan pandemi yang membawa kita pada konsep feminisasi pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan besar yaitu apakah feminisasi kemiskinan dan feminisasi pandemi terjadi di Jatim. Potret kemiskinan dan gender akan dieksplorasi dan diinvestigasi relasinya. Untuk kebutuhan ini, data yang akan digunakan adalah tingkat kemiskinan, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), Indeks Pembangunan Manusia kedua gender (IPM Laki-laki dan IPM Perempuan), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Data penelitian berupa data panel 38 kota dan kabupaten di Jatim dalam rentang waktu 2012 hingga 2016. Tahun 2016 tidak termasuk*

*dalam analisis tingkat kota/kabupaten mengingat data yang tidak tersedia. Mengenai dampak Covid-19 terhadap tingkat kemiskinan, keberdayaan gender, dan keterbangunan gender, kelima variabel akan diperbandingkan antara tahun 2019 dengan 2020. Sumber data (sekunder) berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dokumentasi daring dari laman resmi akan dilakukan. Alat analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, regresi data panel, dan uji T. Penelitian ini menyimpulkan bahwa feminisasi kemiskinan dan feminisasi pandemi terjadi di Jatim. Penelitian ini pula menawarkan saran, baik untuk kebutuhan pembuatan kebijakan, maupun untuk riset lanjutan yang relevan.*

*Kata Kunci: kemiskinan, gender, pandemic, covid.*

## **Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh setiap bangsa dan negara. Setiap negara mencoba mencari cara untuk bagaimana mengatasi masalah kemiskinan. Begitu pentingnya isu kemiskinan untuk ditanggulangi, PBB dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) memosisikan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai tujuan pertama (*No Poverty*). Tujuan-tujuan lain pun dari total yang berjumlah 17 buah didominasi oleh isu yang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Agenda SDGs merupakan kelanjutan dari agenda *Millenium Development Goals* (MDGs) yang juga menempatkan isu kemiskinan sebagai persoalan yang pertama yang perlu untuk ditanggulangi secara global.

Dalam konteks isu gender, kemiskinan menjadi persoalan yang begitu melekat terhadapnya. Hal ini disebabkan karena kaum perempuan dan anak-anak mengalami kemiskinan jauh lebih tinggi dan parah dibandingkan kaum laki-laki. Sampai-sampai terbentuklah konsep yang bernama Feminisasi Kemiskinan yang awal mulanya diangkat oleh Diane Pearce pada tahun 1978<sup>1</sup>. Ada dua konsep terkait feminisasi kemiskinan. Pertama, jumlah kaum perempuan di antara mereka yang miskin semakin meningkat. Kedua, meningkatnya pula jumlah kepala rumah tangga miskin yang berjenis kelamin perempuan pada rumah-rumah tangga miskin. Dalam merespons isu ini, PBB pun sampai melakukan Deklarasi Beijing di tahun 1995. Dalam SDGs, kesetaraan gender menjadi tujuan kelima.

---

<sup>1</sup> Rahutami, A.I., & Matitaputty, S.J. "Gender Issues of Poverty Alleviation in Indonesia. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics, and Law, Vol. 13, 2020.

Jawa Timur merupakan provinsi yang walaupun sebagai kontributor kapasitas ekonomi nomor dua tertinggi di Indonesia, tetapi dengan tingkat kemiskinan yang berada di atas rata-rata nasional. Selama tiga tahun terakhir, sumbangsih ekonomi Jatim berada secara konsisten di angka 14,6 persen. Satu peringkat di bawah DKI Jakarta dengan sumbangsih di kisaran 17,3 hingga 17,6 persen di rentang yang sama. Namun jika dilihat dalam konteks kemiskinan, persentase kemiskinan Jatim sebesar 10,2 persen (September 2019), 11,46 persen (September 2020), dan 11,40 persen (Maret 2021). Angka-angka tersebut konsisten selalu berada di atas angka rata-rata nasional yang sebesar 9,22 persen, 10,19 persen, dan 10,14 persen di masing-masing tahun yang sama. Baik sebelum (September 2019) maupun setelah sekitar 6 bulan (September 2020) pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, Jatim berada di peringkat ke-16 di antara 33 provinsi lain. Setelah kisaran satu tahun pandemi (Maret 2021), Jatim justru naik satu peringkat di posisi ke-15 sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Tingginya tingkat kemiskinan Jatim dapat dijelaskan setidaknya berdasarkan tingkat pendapatan (pendapatan per kapita), keterbangunan manusia (IPM dan IPG/Indeks Pembangunan Gender), dan keberdayaan manusia (IDG/Indeks Pemberdayaan Gender). Dilihat dari pendapatan per kapita, walaupun Jatim sebagai nomor dua tertinggi kontributor ekonomi nasional, tetapi dalam konteks ini Jatim hanya berada pada peringkat ke-9 pada tahun 2020 dengan besaran Rp57,65 juta. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk Jatim yang juga besar di peringkat ke-2 yang sebesar 39,96 juta orang di 2020 setelah Jabar yang sebesar 49,57 juta orang. Kajian Fajriyah dan Rahayu (2016)<sup>2</sup> menyimpulkan bahwa kenaikan pendapatan per kapita akan menurunkan tingkat kemiskinan Jatim. Sementara kajian Setiawati dan Setiawan (2012)<sup>3</sup> menyimpulkan bahwa kenaikan tingkat pendapatan justru signifikan meningkatkan kemiskinan di Jawa Timur. Namun berbeda dengan kajian

---

<sup>2</sup> Fajriyah, N., & Rahayu, S.P. "Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Menggunakan Regresi Data Panel". *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Vol. 5, 2016

<sup>3</sup> Setiawati, A.K., & Setiawan. "Pemodelan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur dengan Pendekatan Ekonometrika Panel Spasial". *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Vol. 1, 2012.

Azizah, Sudarti, dan Kusuma (2018) yang menyimpulkan tidak berpengaruh signifikan<sup>4</sup>.

Dari sisi IPM, Jatim berada di peringkat ke-15 di antara provinsi-provinsi lain dengan besaran angka 71,71 di 2020. yang masih di bawah angka rata-rata nasional yang sebesar 71,94. Sementara, IPM perempuan Jatim di 2020 yang sebesar 69,36 masih berada di atas angka rata-rata nasional yang sebesar 69,19. Penelitian Sari, Rasyid, dan Senen (2020) menyimpulkan bahwa IPM signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan dengan arah negatif<sup>5</sup>.

Dilihat dari perspektif gender, IDG Jatim berada di peringkat ke-7 dengan angka sebesar 73,03 di 2020. Artinya, derajat keberdayaan perempuan Jatim di peringkat tujuh secara nasional. Sementara IPG Jatim di tahun yang sama berada di peringkat ke-15 dengan besaran angka 91,07. Artinya, kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan Jatim berada di posisi tengah di antar provinsi di Indonesia. Penelitian ini belum menemukan kajian-kajian yang secara lugas menginvestigasi pengaruh IDG dan IPG terhadap tingkat kemiskinan di Jatim. Di provinsi tetangga (Jateng), penelitian oleh Walid dan Pratama (2020) menyimpulkan bahwa IPG dan IDG tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Jateng<sup>6</sup>. Hal senada, penelitian oleh Adnan dan Amri (2020) di 8 provinsi yang masuk dalam bagian barat Indonesia dalam rentang waktu 2010-2018 menyimpulkan bahwa variabel IDG tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, variabel lain yaitu tingkat pendapatan perempuan (salah satu indikator komposit IPG) berpengaruh signifikan dengan arah negatif. Dalam penelitian yang lebih makro, menggunakan data 32 provinsi dalam rentang waktu yang sama, Adnan dan Amri (2020) juga menemukan bahwa variabel sumbangan pendapatan perempuan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan begitu pula sebaliknya, dengan arah hubungan negatif<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Azizah, E.W., Sudarti, & Kusuma, H. "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Per Kapita dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2, 2018.

<sup>5</sup> Sari, I.P, Rasyid, A.H.A., & Senen. "Pengentasan Kemiskinan di Jawa Timur dengan Pendekatan Pembangunan Manusia". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 22, 2020.

<sup>6</sup> Walid, & Pratama, B.R. "Analysis of Gender Inequality in Poverty Reduction Program". *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 4, 2020.

<sup>7</sup> Adnan, G., & Amri, K. "Apakah Pendapatan Perempuan Dapat Mengurangi Kemiskinan? Bukti Data Panel di Indonesia". *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, Vol. 8, 2020.

Di saat isu gender dan feminimisasi kemiskinan semakin dibahas dan dianggap penting oleh berbagai pihak, kajian-kajian terkait hal ini di Indonesia dan terkhusus di Jatim belum secara intensif dan ekstensif untuk diulas. Terutama yang menggunakan variabel keberdayaan gender (IDG), keterbangunan gender (IPM perempuan), dan kesetaraan/ketimpangan gender (IPG). Sisi penting mengapa upaya penanggulangan harus memasukkan isu gender agar kebijakan yang diluncurkan tidak bias gender dan tidak mengeksklusi variabel-variabel yang ternyata justru sangat relevan dan krusial. Selain itu, penting untuk menelusuri bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap ketiga variabel gender tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan diskursus tersebut.

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana potret keberdayaan perempuan, pembangunan perempuan, dan ketimpangan gender di Jatim dan relasinya terhadap tingkat kemiskinan? Apakah feminisasi kemiskinan terjadi di Jatim?
2. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap keberdayaan perempuan, pembangunan perempuan, dan ketimpangan gender?

## **Tinjauan Pustaka**

### ***Kemiskinan***

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional. Bahkan untuk konseptualisasinya saja ada berbagai sudut pandang yang berbeda. Menurut Goernick dan Boeri (2019), ada tiga perspektif kemiskinan, yaitu sumber daya ekonomi, kapabilitas, dan eksklusi sosial. Perspektif pertama—sumber daya ekonomi—adalah pendekatan yang paling banyak digunakan. Berdasarkan perspektif ini, yang dikategorikan miskin adalah seseorang atau rumah tangga yang sumber daya ekonominya (penghasilan, konsumsi, atau kombinasi keduanya) tidak mampu atau berada di bawah angka median distribusi populasinya. Perspektif ini dikritik karena terlalu sempit, statis, dan tidak melingkupi kedua sisi fenomena multidimensional kemiskinan yaitu materi dan deprivasi sosial<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Gornick, J.C., & Boeri, N. "Gender and Poverty". *The Oxford Handbook of the Social Science of Poverty*. Cetakan ke-1, Oxford University Press, New York, 2016.

Perspektif kedua—kapabilitas—memasukkan hambatan seseorang terhadap kesempatan dan kemampuan untuk menghasilkan hasil yang bernilai, dengan kata lain adalah kebebasan untuk mencapai sesuatu. Amartya Sen adalah tokoh yang sangat asosiatif dengan perspektif ini. Perspektif ketiga—eksklusi sosial—memandang kemiskinan sebagai sebuah situasi di mana berbagai ketidakmujuran terjadi seperti dalam konteks marginalisasi pasar kerja, ketidakmampuan ekonomi, dan isolasi sosial.

Menimbang multidimensional masalah kemiskinan, PBB membuat indeks yang bernama Indeks Kemiskinan Multidimensi/IKM (*Multidimensional Poverty Index/MPI*). Indeks ini mengukur deprivasi seseorang atau rumah tangga menggunakan 10 indikator yang terkategori ke dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Indikator-indikator tersebut adalah nutrisi, kematian bayi, lama sekolah, partisipasi sekolah, bahan bakar untuk memasak, sanitasi, air minum, listrik, perumahan, dan kepemilikan aset. Indeks ini merupakan pembaharuan dari yang awalnya bernama Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index/HPI*).

Dalam konteks Indonesia, BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya—pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah terkait makanan dan nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian, penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri adalah besaran rupiah yang dihitung yang di setiap daerah relatif berbeda besarnya. Dapat kita simpulkan bahwa BPS dalam mendefinisikan kemiskinan masuk pada kategori yang pertama, yaitu perspektif sumber daya ekonomi. Walaupun, BPS telah melakukan pengumpulan data-data yang sesuai dengan kebutuhan pengukuran IKM/MDI untuk kebutuhan riset publik.

### ***Kemiskinan dan Gender***

Banyak literatur menyatakan bahwa kemiskinan itu berwajah perempuan. Maksudnya adalah di mana ada kemiskinan, di tempat tersebut mereka yang miskin lebih banyak dan lebih parah berasal dari kaum perempuan. Bahkan hal ini disebut oleh Fukuda-Parr (1999) sebagai sebuah *truism*, pernyataan yang sudah jelas benar

dan bukan hal yang baru<sup>9</sup>. Pada tahun 70an, konsep feminisasi kemiskinan (*feminization of poverty*) muncul. Diana Pearce mengangkat konsep ini setelah kajiannya di Amerika Serikat mendapati bahwa kaum perempuan dan rumah tangga yang dikepalai perempuanlah yang lebih banyak dan lebih parah dalam mengalami kemiskinan. Menurut Chant (2007) karakteristik umum dari feminisasi kemiskinan adalah di mana perempuan—relatif terhadap laki-laki—(1) mengalami insiden kemiskinan lebih tinggi, (2) mengalami kemiskinan yang lebih dalam/buruk, (3) lebih rentan mengalami kemiskinan yang lebih panjang, (4) menanggung beban yang lebih berat dalam mengalami kemiskinan, (5) menghadapi tantangan yang lebih banyak untuk keluar dari kemiskinan, (6) lebih rentan jatuh miskin ketika berperan sebagai kepala keluarga, (7) kelompok yang paling miskin ketika berperan sebagai kepala keluarga, dan (8) cenderung mewariskan kemiskinan ke anak-anak mereka ketika mereka sebagai kepala rumah tangga (kemiskinan lintas generasi)<sup>10</sup>.

Kajian-kajian mengenai feminisasi kemiskinan dalam konteks global telah banyak dilakukan. Kajian Ede'o, Katebo, dan Chala (2020) mengonfirmasi konsep ini pada kasus kemiskinan di Sub-Sahara Afrika<sup>11</sup>. Kajian mereka menyimpulkan bahwa rumah tangga yang dikepalai perempuan di Ethiopia, Malawi, Rwanda, dan Tanzania berkondisi lebih miskin dibandingkan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki. Penelitian oleh Medeiros dan Costa (2008) juga mengonfirmasi konsep ini di Amerika Latin. Mereka menemukan bahwa kemiskinan lebih tinggi di kalangan perempuan dibandingkan kaum laki-laki<sup>12</sup>.

Di Indonesia, penelitian oleh Adnan dan Amri (2020) menghasilkan temuan dengan isu serupa (feminisasi kemiskinan). Penelitian mereka pada 8 provinsi yang masuk dalam Kawasan Barat Indonesia dalam rentang 2010-2018 menyimpulkan bahwa peningkatan pada pendapatan perempuan mengakibatkan penurunan pada angka kemiskinan. Pada penelitian lain yang lebih makro yang menggunakan data 32 provinsi dengan rentang waktu yang sama, Adnan dan Amri (2020) juga

---

<sup>9</sup> Fukuda-Parr, Sakiko. "What Does Feminization of Poverty Mean? It Isn't Just Lack of Income". *Feminist Economics*, Vol. 5, 1999.

<sup>10</sup>

<sup>11</sup> Ede'o, A.Z., Ketebo, J.H., & Chala, B.W. "Feminization of multidimensional urban poverty in sub-Saharan Africa: Evidence from selected countries". *African Development Review*, Vol. 32, 2020.

<sup>12</sup> Medeiros, M., & Costa, J. "Is There a Feminization of Poverty in Latin America?". *World Development*, Vol. 36, 2008.

mendapatkan kesimpulan yang serupa<sup>13</sup>. Dalam konteks Jatim, mengenai isu keluarga dengan kepala rumah tangga perempuan, penelitian Intaniswara (2013) justru menyanggah isu feminisasi kemiskinan. Menggunakan data Indonesia Family Life Survey 2014 kajiannya tidak menemukan perbedaan kemiskinan yang lebih tinggi pada rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan dibandingkan dengan rumah tangga dengan kepala keluarga laki-laki<sup>14</sup>.

Penelitian yang spesifik mengeksplorasi dan menginvestigasi kemiskinan pada kaum perempuan di Jatim di antaranya oleh Nisak dan Sugiharti (2020) dan Wahyudi (2020). Kajian Nisak dan Sugiharti (2020) di 4 kabupaten di Pulau Madura menghasilkan temuan pertama bahwa kesehatan reproduksi, tingkat pendidikan, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan status pekerjaan perempuan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan perempuan. Temuan kedua adalah bahwa pendidikan terakhir dari kepala keluarga perempuan, kualitas sanitasi, kualitas air minum dan mencuci, jenis sumber penerangan, dan jumlah anggota keluarga mempengaruhi secara signifikan kemiskinan pada rumah tangga yang dikepalai oleh kaum perempuan<sup>15</sup>. Penelitian oleh Wahyudi (2020) mengenai bantuan usaha Jalin Matra (sebuah program untuk penanggulangan feminisasi kemiskinan di Jatim) bagi para janda di Jatim yang berjumlah 150 orang menemukan bahwa kenaikan penghasilan mereka meningkat lebih dari 100 persen setelah diberikan bantuan<sup>16</sup>.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dalam upaya untuk mengeksplorasi potret keberdayaan perempuan, pembangunan perempuan, dan ketimpangan gender di Jatim dan relasinya terhadap kemiskinan. Kemiskinan menjadi isu sangat krusial tidak hanya karena memang berkaitan erat dengan kesejahteraan, *well-being*, dan kebahagiaan

---

<sup>13</sup> Adnan, G., & Amri, K. "Apakah Pendapatan Perempuan Dapat Mengurangi Kemiskinan? Bukti Data Panel di Indonesia". *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, Vol. 8, 2020.

<sup>14</sup> Intaniswara, S., Analisis Pengaruh Kepala Rumah Tangga Perempuan terhadap Status Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.

<sup>15</sup> Nisak, S.S., & Sugiharti, L. "Gender Inequality and Women Poverty in Indonesia". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Vol. 11, 2020.

<sup>16</sup> Wahyudi, A. "Analisis Kinerja Program Jalin Matra untuk Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Jawa Timur". *Jurnal Cakrawala*. Vol. 14, 2020.



hidup manusia, tetapi juga kian genting dan penting untuk ditelusuri di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang begitu menantang bagi proses pembangunan dan keberlangsungan hidup manusia. Isu gender di lain pihak begitu penting mengingat begitu banyak kasus bahwa faktor, penyebab, dan dampak paling kritis dari kemiskinan berorientasi pada kondisi kehidupan kaum perempuan.

Topik pemberdayaan gender membawa kita pada diskursus seberapa berdaya perempuan. Alat ukur yang digunakan secara global dan nasional adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau dalam istilah internasionalnya adalah *Gender Empowerment Index* (GEM). Badan Pusat Statistik menggunakan memasukkan tiga dimensi untuk mengukur indeks ini, yaitu (a) keterwakilan di parlemen yang menggunakan indikator proporsi keterwakilan perempuan di parlemen, (b) pengambilan keputusan yang menggunakan indikator proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknis dari kalangan perempuan, dan (c) distribusi pendapatan kaum perempuan yang menggunakan indikator upah buruh non-pertanian.

Topik pembangunan manusia membawa kita pada diskursus seberapa terbangun/sejahtera kedua gender yaitu laki-laki dan perempuan. Alat ukur yang digunakan adalah IPM Laki-laki dan IPM Perempuan. Pemisahan antara keduanya membantu kebutuhan analisis dan pembuatan kebijakan yang lebih presisi.

Topik keterbangunan gender membawa kita pada diskursus seberapa setaranya keterbangunan kaum perempuan jika dibandingkan kaum laki-laki. Alat ukur yang digunakan secara global dan nasional adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau dalam istilah internasionalnya adalah *Gender Development Index* (GDI). Indeks ini merupakan rasio IPM kaum perempuan terhadap IPM kaum laki-laki. Badan Pusat Statistik menggunakan tiga dimensi untuk mengukur indeks ini, yaitu (a) umur panjang dan sehat yang menggunakan indikator angka harapan hidup pada saat lahir, (b) pengetahuan yang menggunakan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan (c) kehidupan yang layak yang menggunakan indikator perkiraan pendapatan. Isu gender diangkat dalam kajian ini dikarenakan diskursus nasional, regional, dan lokal di Jatim masih relatif jarang dilakukan. Terutama yang menggunakan IDG dan IPG secara kuantitatif dalam kaitannya dengan tingkat kemiskinan.

Unit analisis penelitian ini adalah provinsi dan kota/kabupaten di Jatim. Rentang data yang digunakan dari tahun 2012 hingga 2021 bergantung dari isu yang dibahas, alat analisis apa yang sedang digunakan, dan ketersediaan data. Sumber data utama penelitian adalah dokumentasi data dan publikasi daring dari situs-situs BPS baik tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten di Jatim. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi dan pengunduhan dari situs-situs tersebut. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, regresi data panel, dan t-test. Piranti yang digunakan untuk melakukan analisis-analisis tersebut adalah bahasa pemrograman R. Uraian masing-masing alat analisis tersebut adalah sebagai berikut.

### ***Statistik Deskriptif***

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat potret, distribusi/sebaran, dan tren dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

### ***Regresi Data Panel***

Regresi data panel digunakan dalam penelitian ini untuk menginvestigasi relasi variabel-variabel independen (IDG, IPM Laki-laki, IPM Perempuan, dan IPG). Variabel IDG digunakan untuk menginvestigasi apakah tingkat keberdayaan gender berpengaruh terhadap kemiskinan. Variabel IPM Laki-laki dan IPM perempuan digunakan untuk mengetahui apakah tingkat keterbangunan manusia berpengaruh terhadap kemiskinan dan apakah ada perbedaan antara keduanya. Variabel IPG digunakan untuk menemukan kesimpulan apakah ketimpangan gender berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Regresi data panel digunakan karena penelitian ini melibatkan data *cross section* berupa 38 kota dan kabupaten di Jatim dan data *time series* dari tahun 2012 hingga tahun 2020. Tahun 2016 tidak termasuk dikarenakan tidak tersedianya data tingkat kota/kabupaten pada waktu ini. Variabel ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural untuk kebutuhan analisis elastisitas. Persamaan regresi dipisah masing-masing untuk menemukan empirisme dan mencegah terjadinya multikolinearitas. Persamaan regresi masing-masingnya sebagai berikut:

$$\text{LnTKit} = \beta_1 + \beta_2 \text{LnIDG}_{it} + \text{uit}$$

$$\text{LnTKit} = \beta_1 + \beta_2 \text{IPM\_LKit} + \text{uit}$$

$$\text{LnTKit} = \beta_1 + \beta_2 \text{IPM\_PRit} + \text{uit}$$

$$\text{LnTKit} = \beta_1 + \beta_2 \text{LnIPGit} + \text{uit}$$

di mana,

$$i = 1, 2, \dots, 38$$

$$t = 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020$$

TK = tingkat kemiskinan

IDG = indeks pemberdayaan gender

IPM\_LK = indeks pembangunan manusia laki-laki

IPM\_PR = indeks pembangunan manusia perempuan

IPG = indeks pembangunan gender

Untuk memastikan model terbaik antara pooled OLS (common effect), random effect, fixed effect, dan time fixed effect, berbagai uji untuk menyelesaikannya dilakukan seperti Chow Test, Lagrange Multiplier BP test, dan Hausmann test. Uji-uji diagnostik lain yang relevan dilakukan seperti Augmented Dickey Fuller test untuk uji stasioneritas, Breusch-Pagan untuk uji heteroskedastisitas, Pesaran CD untuk uji *cross-sectional dependence*, dan Breusch-Godfrey test untuk menguji korelasi serial. Jika terdapat heteroskedastisitas dan korelasi serial, maka Sandwich Estimator digunakan untuk membuat *robust standard of error*.

### ***T-Test***

T-Test (uji beda 2 variabel) digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan keterbangunan/kesejahteraan antara perempuan dengan laki-laki. Variabel yang akan digunakan adalah IPM laki-laki dan IPM perempuan dalam rentang 2012-2020 (minus 2016). T-Test juga digunakan untuk mengetahui bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap tingkat keberdayaan, keterbangunan, dan ketimpangan gender antara tahun 2019 dengan 2020. Variabel yang digunakan adalah IDG, IPM Laki-laki, IPM Perempuan, dan IPG.

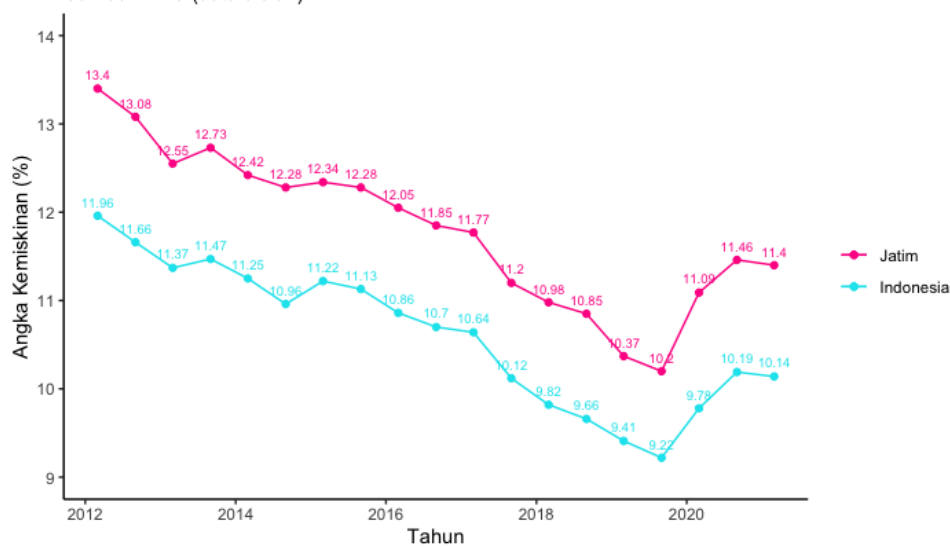
### ***Kemiskinan Jatim: Potret dan Dampak dari Pandemi Covid-19***

Tingkat kemiskinan Jatim dalam rentang 2012-2020 selalu berada di atas tingkat kemiskinan nasional (Grafik 1). Keduanya menunjukkan pola yang bisa dikatakan sangat mirip. Tren kemiskinan Jatim menunjukkan penurunan dalam rentang 9 tahun tersebut. Kemiskinan Jatim di 2012 yang sebesar 13,1 persen turun

menjadi 10,2 di 2019. Di 2020 kemiskinan Jatim menunjukkan kenaikan yang tajam menjadi 11,5 persen. Naik sebesar 1,3 persen.

**Grafik 1.**

**Tren Kemiskinan Jatim dalam Perbandingan dengan Nasional Per Maret dan September 2012-2021**



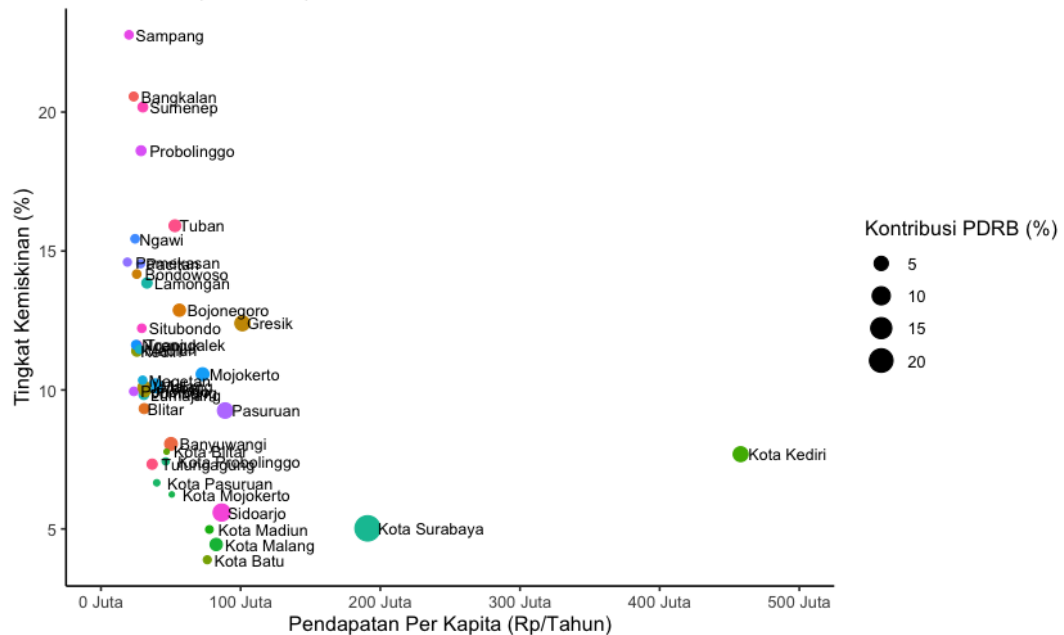
Sumber: Situs BPS Pusat dan Jatim, 2020 (diolah)

Ketimpangan angka kemiskinan antara satu daerah dengan daerah lain di Jatim pada tahun 2020 begitu lebar (Grafik 2). Kemiskinan tertinggi terjadi pada Sampang dengan persentase sebesar 22,78. Sementara kemiskinan terendah terjadi pada Kota Batu yang persentasenya hanya sebesar 3,89. Ada rentang lebar sebesar 18,89 persen. Ketimpangan kemiskinan ini dari berbagai literatur dijelaskan karena berbedanya pula faktor-faktor (variabel-variabel) yang berkorelasi dan mempengaruhi kemiskinan seperti kualitas pendidikan dan SDM, sumber daya alam, struktur ekonomi, kinerja birokrasi, dst.

***Keterbangunan Gender: Potret Ketimpangan dan Feminisasi Kemiskinan***

Tren kualitas kesetaraan keterbangunan gender Jatim yang diwakili oleh IPG menunjukkan kenaikan dalam rentang waktu 2012-2020 dan menunjukkan perbandingan dinamis dengan nasional (Grafik 7). Tahun 2013, 2014, 2015, dan 2020 adalah tahun-tahun di mana IPG Jatim berada di atas IPG Indonesia. Pada tahun-tahun lainnya, IPG Jatim berada di bawah angka nasional.

**Grafik 2.**  
**Sebaran Tingkat Kemiskinan Kota dan Kabupaten Jatim Dilihat dari Pendapatan Per Kapita dan Kontribusi PDRB 2020**



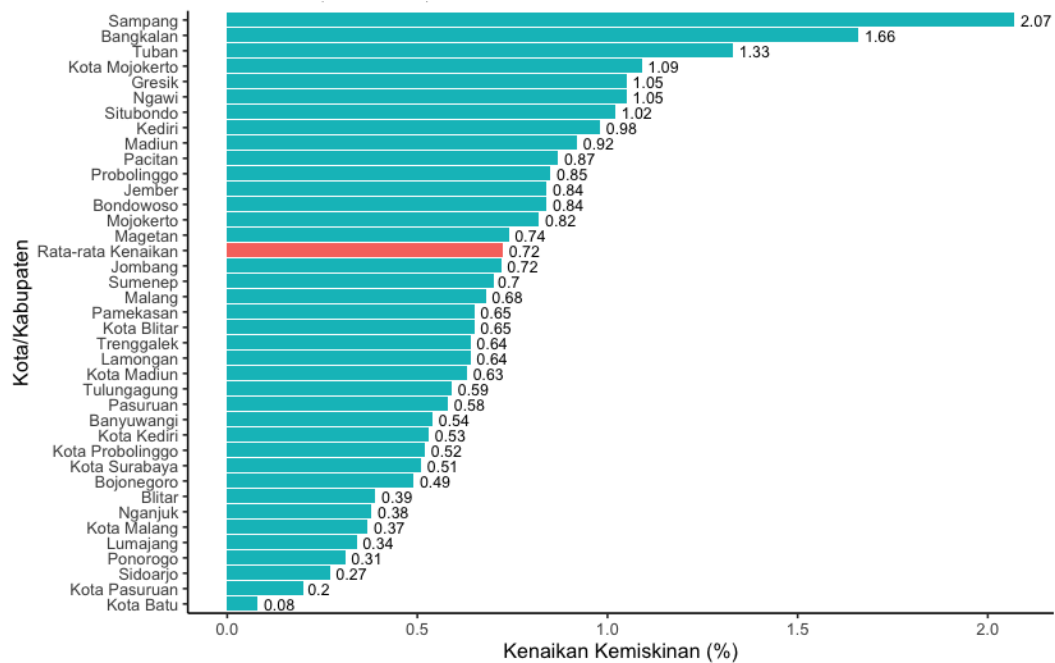
Sumber: Situs BPS Jatim, 2020 (diolah)

Bagaimana pandemi Covid-19 berdampak terhadap kemiskinan Jatim? Rata-rata kenaikan tingkat kemiskinan setelah kisaran 6 bulan pandemi Covid-19—Kasus infeksi Covid-19 pertama Jatim dan Indonesia pada bulan Maret 2020 dan laporan kemiskinan BPS pada September 2020—terjadi di kota dan kabupaten di Jatim adalah sebesar 0,72 persen. Ada 15 kabupaten dan kota yang berada di atas angka rata-rata kenaikan ini (Grafik 3). Tiga kenaikan tertinggi dan dengan kenaikan yang begitu mencolok dibandingkan daerah lainnya adalah Sampang (2,07%), Bangkalan (1,66%), dan Tuban (1,33%).

***Keberdayaan Gender: Potret, Dampak Pandemi Covid-19, dan Relasinya terhadap Kemiskinan***

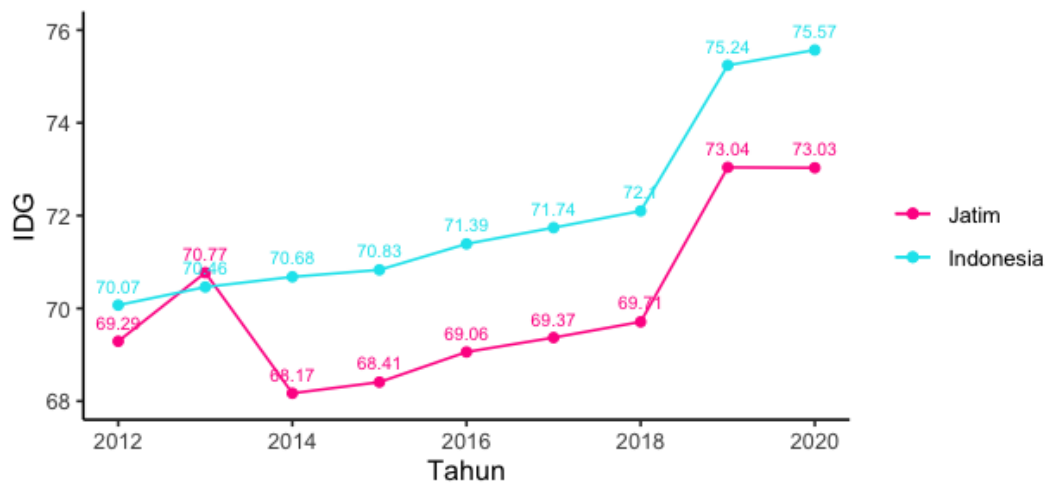
Tingkat keberdayaan gender Jatim dalam rentang 2012-2020, kecuali di tahun 2013, selalu berada di bawah tingkat keberdayaan gender nasional dan menunjukkan tren naik (Grafik 4). Di 2013 terjadi kenaikan yang tajam sehingga mampu unggul di atas rata-rata. Namun kenaikan tajam ini juga menyebabkan penurunan yang tajam di 2014. Kenaikan tajam terjadi kembali di 2019.

**Grafik 3.**  
**Kenaikan Tingkat Kemiskinan Kota dan Kabupaten Jatim Pada Masa Pandemi Covid-19 (September 2019 ke September 2020)**



Sumber: Situs BPS Jatim, 2020 (diolah)

**Grafik 4.**  
**Trend IDG Jatim dan Indonesia 2012-2021**



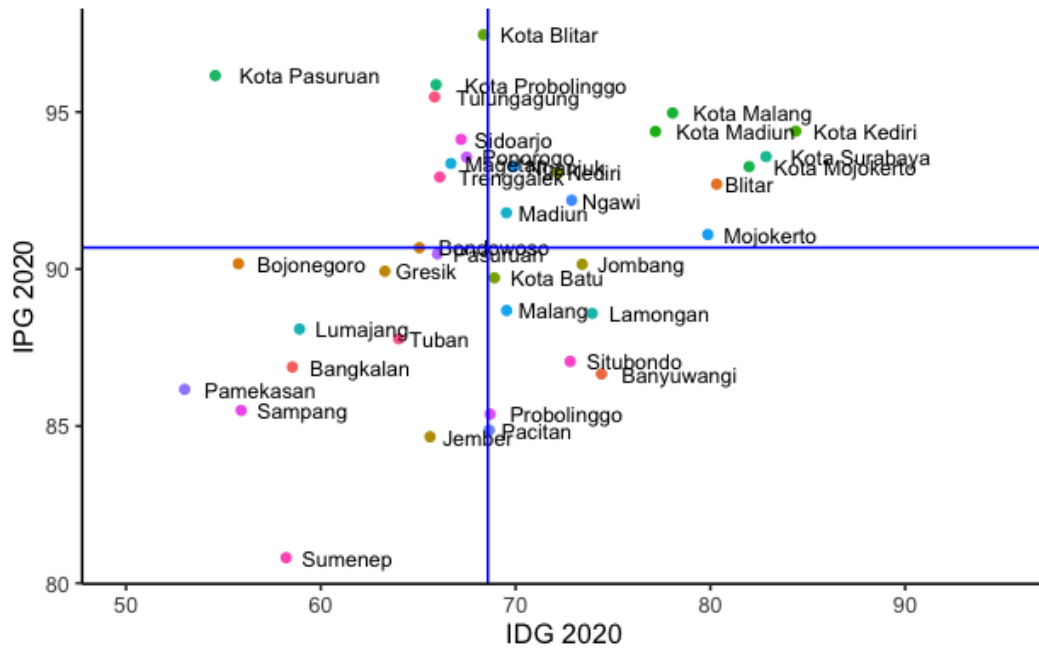
Sumber: Situs BPS Pusat dan Jatim, 2020 (diolah)

Kota Kediri, Kota Surabaya, dan Kota Mojokerto adalah tiga daerah dengan IDG tertinggi di Jatim tahun 2020 dengan angka masing-masing sebesar 84,4, 82,9, dan 82,0 (Grafik 5). Sementara yang terendah adalah Pamekasan (53,0), Kota Pasuruan (54,6), dan Bojonegoro (55,8). Dilihat dari perspektif kinerja ekonomi makro, daerah-daerah dengan IDG tertinggi adalah daerah dengan besaran pendapatan per kapita (PPK) dan kontribusi PDRB yang berada pada lapisan atas. Kota Kediri adalah daerah dengan PPK tertinggi di Jatim dan kontributor PDRB di peringkat kelima. Kota Surabaya adalah daerah dengan PPK kedua tertinggi dan dengan besaran kontribusi di peringkat pertama. Sementara Mojokerto agak unik. Peringkat besaran PPKnya nomor 6 tetapi dengan kontribusi ekonomi paling kecil di Jatim pada 2020.

Potret keberdayaan gender setelah berlangsungnya pandemi Covid-19 kurang dari satu tahun tidak menunjukkan penurunan tinggi di Jatim. Penurunan yang hanya sebesar 0,01 poin setidaknya membawa kabar yang tidak terlalu mengkuatirkan terhadap upaya pengarusutamaan gender di Jatim. Namun jika melihat pada tingkat kota dan kabupaten, ada dinamika yang berbeda-beda pada derajat yang substansial (Grafik 6).

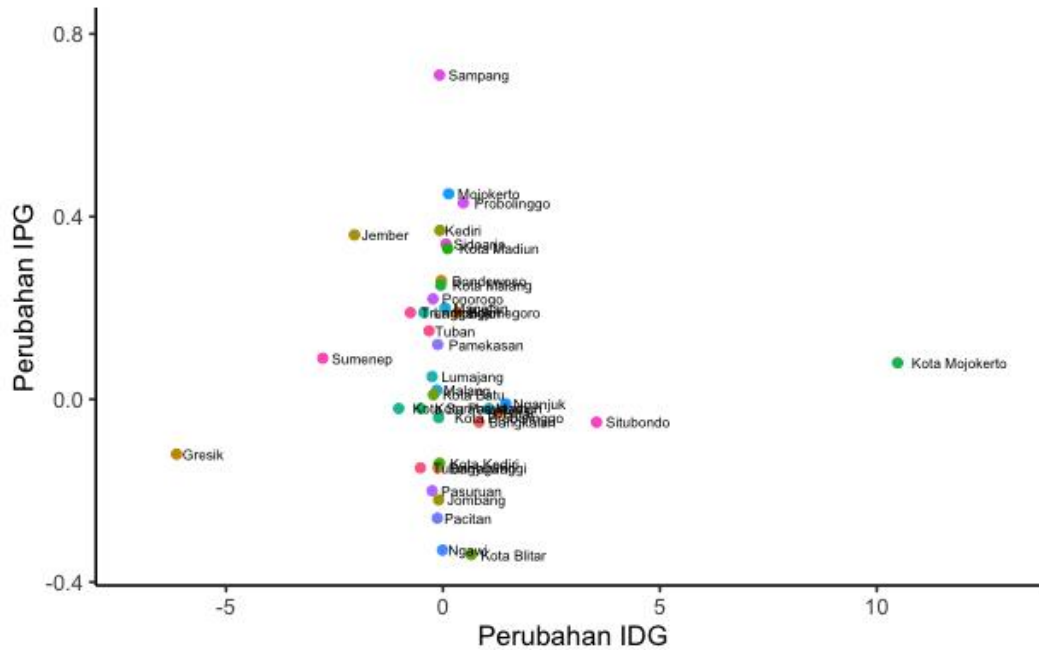
Bagaimana relasi keberdayaan gender terhadap kemiskinan? Dari hasil regresi variabel IDG pada Tabel 1 dengan model terbaik adalah FEM disimpulkan bahwa variabel IDG berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan signifikansi 1 persen. Koefisien sebesar -0,502 dan  $R^2$  sebesar 0,137. Artinya, 1 persen kenaikan pada IDG akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,502 persen, dan begitu pula sebaliknya. Variasi perubahan pada variabel dependen menjelaskan 13,7 persen variasi perubahan pada variabel independen.

**Grafik 5.**  
**Sebaran Kota dan Kabupaten Jatim berdasarkan IDG dan IPG 2020**



Sumber: Situs BPS Pusat dan Jatim, 2020 (diolah)

**Grafik 6.**  
**Kenaikan/Penurunan Angka IDG dan IPG di Masa Pandemi Covid-19**



Sumber: Situs BPS Pusat dan Jatim, 2020 (diolah)



**Tabel 1.**  
**Hasil Regresi Data Panel Variabel IDG**

Variabel Penelitian	Item Hasil Regresi	Pooled	FEM	REM
IDG	ln_idg	-2,011***(0,147)	-0,502***(0,077)	-0,558***(0,078)
	Constant	10,786***(0,617)		4,703***(0,332)
	Observations	304	304	304
	R <sup>2</sup>	0,382	0,137	0,144
	Adjusted R <sup>2</sup>	0,380	0,014	0,141
	F Statistic	186,572***	42,189***	50,852
	Sig.		* $p < 0,1$ ; ** $p < 0,05$ ; *** $p < 0,01$	

- Hasil uji Chow, Lagrange Multiplier, dan Hausman semuanya dengan nilai p-value 0,000 (signifikan pada alpha 1%). Ini mengindikasikan bahwa model FEM yang terbaik.
- Uji Pesaran CD signifikan (p-value = 0,000) yang mengindikasikan bahwa model mengalami *cross-sectional dependence*.
- Uji Breusch-Godfrey/Wooldridge signifikan (p-value = 0,000) yang berarti bahwa ada korelasi serial dalam model.
- Uji Breusch-Pagan dengan p-value 0,000 mengartikan bahwa model heteroskedastik.
- Uji Augmented Dickey-Fuller menghasilkan angka -4,0635 dengan p-value 0,01. Artinya, data terbebas dari kasus *unit root* (stasioner).

Sumber: Hasil regresi data panel menggunakan R

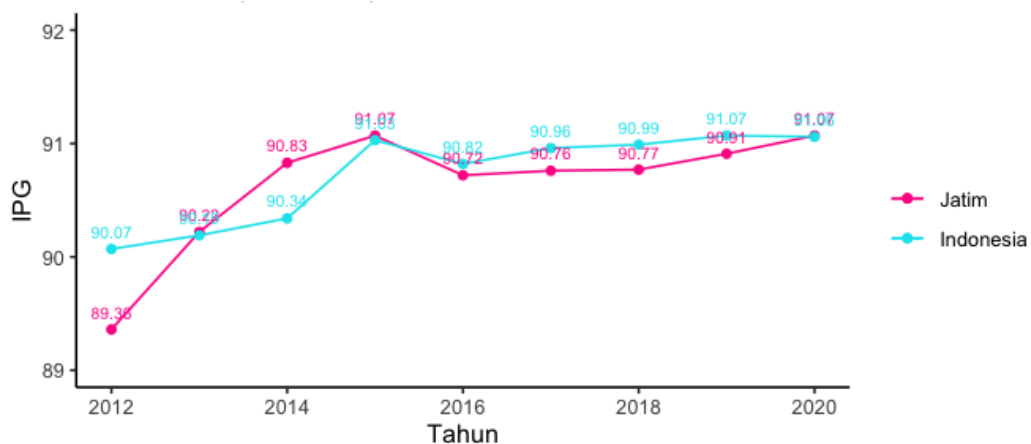
Rata-rata angka IPG Jatim dalam rentang 2012-2020 adalah 90,63. Artinya ada ketimpangan pembangunan dengan rata-rata sebesar 9,37 persen yang dialami perempuan Jatim dalam sembilan tahun tersebut. Daerah dengan kategori administratif kota yaitu Kota Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo merupakan tiga daerah dengan IPG tertinggi (lebih setara) di 2020 (Grafik 5).

Regresi variabel IPM Laki-laki dan IPM Perempuan menunjukkan bahwa model terbaik adalah FEM (Tabel 2). Model variabel IPM Laki-laki berpengaruh

terhadap tingkat kemiskinan dengan signifikansi 1 persen, koefisien = -2,677, dan  $R^2 = 0,698$ . Artinya, kenaikan 1 persen IPM Laki-laki di Jatim akan menurunkan kemiskinan sebesar 2,677 persen, dan begitu pula sebaliknya. Variasi perubahan pada variabel dependen menjelaskan 69,8 persen variasi perubahan pada variabel independen. Sementara, untuk variabel IPM Perempuan, dengan tingkat signifikansi 1 persen, koefisien -2,022, dan  $R^2 = 0,669$ , mengartikan bahwa 1 persen kenaikan pada variabel ini akan menurunkan kemiskinan sebesar 2,022 persen, begitu pula sebaliknya. Variasi perubahan pada variabel dependen dijelaskan sebesar 66,9 persen oleh variasi perubahan pada variabel independen.

**Grafik 7.**

**Trend IPG Jatim dan Indonesia 2012-2021**



Sumber: Situs BPS Pusat dan Jatim, 2020 (diolah)

**Tabel 2.**

**Hasil Regresi Data Panel Variabel IPM Laki-laki dan IPM Perempuan**

Variabel Penelitian	Item Hasil Regresi	Pooled	FEM	REM
IPM Laki-laki	ln_ipm_lk	-5,300***(0,227)	-2,677***(0,108)	-2,754***(0,110)
	Constant	25,154***(0,974)		14,211***(0,475)
	Observations	304	304	304

	R <sup>2</sup>	0,644	0,698	0,675
	Adjusted R <sup>2</sup>	0,643	0,655	0,673
	F Statistic	547,059***	613,450***	626,007
	Sig.	* <i>p</i> <0,1; ** <i>p</i> <0,05; *** <i>p</i> <0,0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil uji Chow, Lagrange Multiplier, dan Hausman semuanya dengan nilai p-value 0,000 (signifikan pada alpha 1%). Ini mengindikasikan bahwa model FEM yang terbaik.</li> <li>• Uji Pesaran CD signifikan (p-value = 0,000) yang mengindikasikan bahwa model mengalami <i>cross-sectional dependence</i>.</li> <li>• Uji Breusch-Godfrey/Wooldridge signifikan (p-value = 0,000) yang berarti bahwa ada korelasi serial dalam model.</li> <li>• Uji Breusch-Pagan dengan p-value 0,2311 mengartikan bahwa model homoskedastik.</li> </ul>			
IPM	ln_ipm_pr	-3,450***(0,138)	-2,022***(0,087)	-2,093***(0,087)
Perempuan	Constant	16,836***(0,577)		11,145***(0,368)
	Observations	304	304	304
	R <sup>2</sup>	0,676	0,669	0,656
	Adjusted R <sup>2</sup>	0,675	0,662	0,655
	F Statistic	629,167***	536,336***	575,234***
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil uji Chow, Lagrange Multiplier, dan Hausman semuanya dengan nilai p-value 0,000 (signifikan pada alpha 1%). Ini mengindikasikan bahwa model FEM yang terbaik.</li> <li>• Uji Pesaran CD signifikan (p-value = 0,00) yang mengindikasikan bahwa model mengalami <i>cross-sectional dependence</i>.</li> <li>• Uji Breusch-Godfrey/Wooldridge signifikan (p-value = 0,00) yang berarti bahwa ada korelasi serial dalam model.</li> <li>• Uji Breusch-Pagan dengan p-value 0,7618 mengartikan bahwa model homoskedastik.</li> </ul>			

Sumber: Hasil regresi data panel menggunakan R

Tabel 3 hasil uji variabel IPG (ln\_ipg) terhadap angka kemiskinan (ln\_ipg) menunjukkan hasil yang signifikan pada alpha 1 persen dengan koefisien berarah

negatif -4,732,  $R^2 = 0,335$ , dan uji F yang juga signifikan dengan alpha 1 persen. Artinya, kenaikan 1 persen IPG akan menurunkan kemiskinan sebesar 4,732 persen dan variasi variabel independen secara simultan menjelaskan variasi variabel independen sebesar 33,5 persen. Besaran koefisien IPG yang sebesar - 4,732 lebih besar dibandingkan koefisien IDG, IPM Laki-laki, dan IPM perempuan yang masing-masing sebesar -0,502, -2,677, dan -2,022.

**Tabel 3.**

**Hasil Regresi Data Panel Variabel IPG**

Variabel Penelitian	Item Hasil Regresi	Pooled	FEM	REM
IPG	ln_ipg	-5,876***(0,384)	-4,570***(0,409)	-4,732***(0,384)
	Constant	28,804***(1,729)		23,660***(1,728)
	Observations	304	304	304
	$R^2$	0,436	0,321	0,335
	Adjusted $R^2$	0,435	0,223	0,333
	F Statistic	233,906	124,997***	151,984
Sig.			* $p < 0,1$ ; ** $p < 0,05$ ; *** $p < 0,0$	

- Hasil uji Chow dan Lagrange Multiplier sama-sama signifikan dengan p-value 0,000 yang artinya uji FEM dan REM sama-sama unggul sebelum uji Hausman dilakukan. Setelah uji Hausman dilakukan dengan p-value 0,2479 (tidak signifikan), maka model REM lah yang terbaik.
- Uji Pesaran CD signifikan (p-value = 0,00) yang mengindikasikan bahwa model mengalami *cross-sectional dependence*.
- Uji Breusch-Godfrey/Wooldridge signifikan (p-value = 0,00) yang berarti bahwa ada korelasi serial dalam model.
- Uji Breusch-Pagan dengan p-value 0,9667 mengartikan bahwa model homoskedastik.

Sumber: Hasil regresi data panel menggunakan R

Uji T pada Tabel 4 membandingkan angka IPM Laki-laki dan IPM Perempuan semua kota dan kabupaten Jatim dalam rentang 2012-2020 (minus

2016) menunjukkan ada perbedaan rata-rata sebesar 7,2 poin dengan hasil uji beda yang signifikan pada  $\alpha$  1 persen ( $T = 14,932$ ,  $DF = 549,74$ , dan  $p\text{-value}$  0,000). Artinya, terdapat perbedaan rata-rata antara kedua variabel tersebut. Keterbangunan antara laki-laki dan perempuan dalam rentang waktu tersebut terdapat ketimpangan. Rata-rata IPM Laki-laki sebesar 73,81 sementara rata-rata IPM Perempuan sebesar 66,59. Artinya ada ketimpangan keterbangunan gender yang sebesar 7,22 di mana kaum perempuan yang tertinggal.

**Tabel 4.**

**Hasil Uji T Perbedaan IPM Laki-laki dengan IPM Perempuan 2012-2020**

Variabel	T	P-Value	Rata-rata IPM Laki-laki	Rata-rata IPM Perempuan	Kesimpulan
IPM Lk vs IPM Pr	14,932	0,000	73,8	66,6	Ada perbedaan signifikan

Sumber: Hasil uji T menggunakan R

Tabel 5 menampilkan indikator-indikator kesejahteraan yang menyangkut dimensi pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, air bersih, telekomunikasi, dan ekonomi antara laki dan perempuan. Hanya pada indikator persentase rumah dengan luas lantai  $> 7,2$  m<sup>2</sup> per kapita menurut jenis kepala keluarga dan pengeluaran per kapita sebulan menurut jenis kelamin kepala keluarga (ribu Rp), kaum perempuan yang lebih besar.

***Pandemi Covid-19: Sebuah Disrupsi Upaya Pengarusutamaan Gender yang Memperlebar Jurang Ketimpangan Gender***

Hasil uji T pada Tabel 6 membandingkan angka rata-rata lima variabel yaitu Kemiskinan, IDG, IPM Laki-laki, IPM Perempuan, dan IPG semua kota/kabupaten Jatim antara tahun 2019 dengan 2020. Semua variabel mengalami kenaikan tetapi IDG dan IPG tidak signifikan.

**Tabel 5.**  
**Perbandingan Indikator Kesejahteraan Laki-laki dan Perempuan Jatim**  
**2019**

Dimensi	No.	Indikator	2019		
			Lk	Pr	Posisi Perempuan
Pendidikan	1	Buta huruf umur >15 tahun (%)	4,77	10,47	Lebih buruk
	2	Rata-rata lama sekolah umur > 15 tahun (tahun)	8,6	7,68	Lebih buruk
	3	Penduduk berumur > 15 tahun yang tidak memiliki ijazah (%)	17,01	24,76	Lebih buruk
	4	Penduduk berumur > 15 tahun berdasarkan pendidikan tertinggi minimal tamat SMP/MTS (%)	56,04	48,32	Lebih buruk
	5	Kepala rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>● SD ke bawah (%)</li> <li>● SMP ke atas (%)</li> </ul>	55,01	75,64	Lebih buruk
			44,99	24,36	Lebih buruk
Ketenagakerjaan	6	Tingkat partisipasi Angkatan kerja (%)	84,31	55,22	Lebih buruk
Perumahan	7	Rumah dengan luas lantai < 7,2 m <sup>2</sup> per kapita menurut jenis kepala keluarga (%)	4,63	3,56	Lebih buruk
	8	Rumah dengan luas lantai > 7,2 m <sup>2</sup> per kapita menurut jenis kepala keluarga (%)	95,37	97,44	Lebih baik
Air bersih	9	Rumah tangga yang mengakses air minum layak menurut jenis kelamin kepala keluarga	94,45	94,09	Lebih buruk
Telekomunikasi	10	Rumah tangga yang mengakses sarana telekomunikasi selama 3			

		bulan terakhir menurut jenis kelamin kepala keluarga:			
		• Telepon seluler/nirkabel (%)	76,54	54,18	Lebih buruk
		• Komputer (%)	9,99	6,14	Lebih buruk
		• Internet (%)	37,51	21,09	Lebih buruk
Ekonomi	11	Pengeluaran per kapita sebulan menurut jenis kelamin kepala keluarga (ribu Rp)	1.113	1.141	<i>Lebih baik</i>

Sumber: Susenas dan Sakernas, BPS 2019

**Tabel 6.**  
**Uji T untuk Menginvestigasi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Variabel-variabel Kemiskinan dan terkait Gender (2019 vs 2020)**

Variabel	T	P-Value	Signifikan (alpha 5%)	Rata-rata Perbedaan (2019 ke 2020)	Perubahan	Diharapkan (Ya/Tidak)
Kemiskinan	11.561	0,000	Ya	0,72	Naik	Tidak
IDG	0,2900	0,773	Tidak	0,10	Naik	Ya
IPM Laki-laki	6,834	0,000	Ya	0,15	Naik	Ya
IPM Perempuan	6,1794	0,000	Ya	0,19	Naik	Ya
IPG	1,9872	0,054	Tidak	0,08	Naik	Ya

Sumber: Hasil uji T menggunakan R

## Diskusi

### *Kemiskinan Jatim: Potret dan Dampak dari Pandemi Covid-19*

Tingkat kemiskinan Jatim dalam rentang 2012-2020 selalu berada di atas tingkat kemiskinan nasional (Grafik 1). Keduanya menunjukkan pola yang bisa dikatakan sangat mirip. Tren kemiskinan Jatim menunjukkan penurunan dalam rentang 9 tahun tersebut. Kemiskinan Jatim di 2012 yang sebesar 13,1 persen turun

menjadi 10,2 persen di 2019. Di 2020, kemiskinan Jatim menunjukkan kenaikan yang tajam menjadi 11,5 persen. Naik sebesar 1,3 persen. Pandemi Covid-19 serta berbagai dampak dan respons kebijakan pemerintah menjadi sebab utama yang dapat diasosiasikan terhadapnya.

Ketimpangan angka kemiskinan antara satu daerah dengan daerah lain di Jatim pada tahun 2020 begitu lebar (Grafik 2). Kemiskinan tertinggi terjadi pada Sampang dengan persentase sebesar 22,78. Sementara kemiskinan terendah terjadi pada Kota Batu yang persentasenya hanya sebesar 3,89. Ada rentang lebar sebesar 18,89 persen. Kalau kita kaitkan dengan kinerja ekonomi makro Jatim, daerah-daerah dengan kemiskinan tinggi adalah daerah yang dengan pendapatan per kapita dan kontribusi PDRB yang rendah.

Tentu kemiskinan dapat disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dsb. tentu memiliki peran dalam membentuk dan dipengaruhi oleh wajah kemiskinan. Berbagai faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan Jatim dari berbagai riset di antaranya adalah (1) angka melek huruf<sup>17</sup>, (2) tingkat partisipasi angkatan kerja<sup>17,18</sup>, (3) penduduk yang bekerja di sektor pertanian<sup>17</sup>, (4) PDRB per kapita<sup>17,18</sup>, (5) laju pertumbuhan ekonomi<sup>18</sup>, (6) tingkat pengangguran terbuka<sup>17</sup>, (7) alokasi dana bantuan langsung mandiri<sup>18</sup>, (8) angka partisipasi sekolah<sup>19</sup>, (9) persentase penduduk dengan air bersih<sup>18</sup>, (10) jumlah anggota keluarga<sup>20</sup>, (11) fasilitas telekomunikasi<sup>20</sup>, dan (12) status wilayah rumah tangga<sup>20</sup>.

Bagaimana pandemi Covid-19 berdampak terhadap kemiskinan Jatim? Rata-rata kenaikan tingkat kemiskinan setelah kisaran 6 bulan pandemi Covid-19 terjadi di kota dan kabupaten di Jatim adalah sebesar 0,72 persen —kasus infeksi Covid-19 pertama Jatim dan Indonesia pada bulan Maret 2020 dan laporan kemiskinan BPS pada September 2020. Ada 15 kabupaten dan kota yang berada di atas angka rata-rata kenaikan ini (Grafik 3). Tiga kenaikan tertinggi dan dengan kenaikan yang

---

<sup>17</sup> Fajriyah, N., & Rahayu, S.P. “Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Menggunakan Regresi Data Panel”. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Vol. 5, 2016.

<sup>18</sup> Setiawati, A.K., & Setiawan. “Pemodelan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur dengan Pendekatan Ekonometrika Panel Spasial. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Vol. 1, 2012.

<sup>19</sup> Qurrotuain (2016)

<sup>20</sup> Zamhari, J., Wisadirana, D., & Kanto, S. “Analisis Determinan Kemiskinan di Jawa Timur”. *Wacana*. Vol. 18, 2015.



begitu mencolok dibandingkan daerah lainnya adalah Sampang (2,07%), Bangkalan (1,66%), dan Tuban (1,33%). Tiga daerah ini merupakan daerah lima besar kemiskinan tertinggi di Jatim selama ini. Artinya, daerah yang memang sudah miskin akan lebih rentan untuk jatuh lebih dalam lagi dalam kemiskinan ketika ada kejadian anomali yang menantang bagi upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Hal ini dikarenakan kualitas ketahanan sosial, ekonomi, birokrasi, dst. di daerah-daerah miskin yang juga tidak setara dengan daerah-daerah yang relatif sudah lebih maju.

### ***Keberdayaan Gender: Potret, Dampak Pandemi Covid-19, dan Relasinya terhadap Kemiskinan***

Tingkat keberdayaan gender Jatim dalam rentang 2012-2020, kecuali di tahun 2013, selalu berada di bawah tingkat keberdayaan gender nasional dan menunjukkan tren menaik (Grafik 4). Di 2013 terjadi kenaikan yang tajam sehingga mampu unggul di atas rata-rata. Namun kenaikan tajam ini juga menyebabkan penurunan yang tajam di 2014. Kenaikan tajam terjadi kembali di 2019. Penjelasan utamanya adalah karena pada tahun ini pemilu legislatif diselenggarakan. Porsi anggota legislatif perempuan yang di 2018 sebesar 15 persen meningkat menjadi 18,33 persen. Variabel-variabel lain yang merupakan indikator komposit IDG seperti sumbangan pendapatan perempuan dan jumlah tenaga profesional perempuan tidak menunjukkan peningkatan yang substansial berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kota Kediri, Kota Surabaya, dan Kota Mojokerto adalah tiga daerah dengan IDG tertinggi di Jatim tahun 2020 dengan angka masing-masing sebesar 84,4, 82,9, dan 82,0 (Grafik 5). Sementara yang terendah adalah Pamekasan (53,0), Kota Pasuruan (54,6), dan Bojonegoro (55,8). Dilihat dari perspektif kinerja ekonomi makro, daerah-daerah dengan IDG tertinggi adalah daerah dengan besaran pendapatan per kapita (PPK) dan kontribusi PDRB yang berada pada lapisan atas. Kota Kediri adalah daerah dengan PPK tertinggi di Jatim dan kontributor PDRB di peringkat kelima. Kota Surabaya adalah daerah dengan PPK kedua tertinggi dan dengan besaran kontribusi di peringkat pertama. Sementara Mojokerto agak unik. Peringkat besaran PPKnya nomor 6 tetapi dengan kontribusi ekonomi paling kecil di Jatim pada 2020. Jika menelusuri indikator-indikator komposit IDG dalam

menginvestigasi posisi peringkat IDG daerah di Jatim setidaknya tahun 2020, indikator yang paling relevan adalah porsi anggota legislatif perempuan. Kota Kediri, Kota Surabaya, dan Kota Mojokerto adalah memang di peringkat pertama, kedua, dan ketiga dalam hal porsi anggota legislatif perempuan yang masing-masing sebesar 36,67, 32, dan 32 persen. Kota Pamekasan dan Kota Pasuruan memang di peringkat terbawah dengan persentase porsi anggota legislatif perempuan sebesar 4,44 dan 3,33 persen.

Potret keberdayaan gender setelah berlangsungnya pandemi Covid-19 kurang dari satu tahun tidak menunjukkan penurunan tinggi di Jatim. Penurunan yang hanya sebesar 0,01 poin setidaknya membawa kabar yang tidak terlalu menguatirkan—relatif bertahan—terhadap upaya pengarusutamaan gender di Jatim. Namun jika melihat pada tingkat kota dan kabupaten, ada dinamika yang berbeda-beda pada derajat yang substansial (Grafik 6). Gresik mengalami penurunan IDG yang terlampau tinggi dibandingkan daerah lain yang sebesar -6,14—angka median perubahan di tingkat kota dan kabupaten adalah -0,09. Pada sisi yang berseberangan, Kota Mojokerto justru menunjukkan peningkatan IDG yang begitu drastis di 2020, yaitu sebesar 10,48. Hal ini disebabkan utamanya dikarenakan kenaikan jumlah anggota legislatif perempuan yang di 2019 sebanyak 16 persen menjadi 32 persen di 2020.

Bagaimana relasi keberdayaan gender terhadap kemiskinan? Dari hasil regresi variabel IDG pada Tabel 1 dengan model terbaik adalah FEM disimpulkan bahwa variabel IDG berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan signifikansi 1 persen. Koefisien sebesar -0,502 dan  $R^2$  sebesar 0,137. Artinya, 1 persen kenaikan pada IDG akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,502 persen, dan begitu pula sebaliknya. Model ini menjelaskan 13,7 persen tingkat kemiskinan Jatim. Hasil temuan ini berlawanan dengan penelitian Walid dan Pratama (2020) di Jateng yang menyimpulkan bahwa IDG tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan<sup>21</sup>. Temuan ini berbeda pula dengan kajian Adnan dan Amri (2020) di 8 provinsi yang masuk dalam bagian barat Indonesia dalam rentang waktu 2010-2018 yang menyimpulkan bahwa variabel IDG tidak berpengaruh signifikan

---

<sup>21</sup> Walid, & Pratama, B.R. "Analysis of Gender Inequality in Poverty Reduction Program". *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 4, 2020.

terhadap tingkat kemiskinan<sup>22</sup>. Dapat disimpulkan bahwa kasus keberdayaan perempuan di Jatim menunjukkan kekhasan dengan daerah lain di Indonesia dan penting untuk dimasukkan dalam perumusan kebijakan dalam penanganan kemiskinan. Studi kasus Oyekanmi dan Moliki (2012) di Ogun State, Nigeria, menyimpulkan bahwa upaya pemberdayaan gender berupa advokasi pendidikan anak perempuan, kekerjaan perempuan pada sektor formal dan bergaji tinggi, dan implementasi 35 persen porsi perempuan di pemerintahan menjadi panacea untuk mengurangi kemiskinan. Begitu pula kiranya dengan Jatim<sup>23</sup>.

### ***Urgensi Pengarusutamaan Gender: Potret Ketimpangan dan Feminisasi Kemiskinan***

Tren kualitas kesetaraan keterbangunan gender Jatim yang diwakili oleh IPG menunjukkan kenaikan dalam rentang waktu 2012-2020 dan menunjukkan perbandingan dinamis dengan nasional (Grafik 7). Tahun 2013, 2014, 2015, dan 2020 adalah tahun-tahun di mana IPG Jatim berada di atas IPG Indonesia. Pada tahun-tahun lainnya, IPG Jatim berada di bawah angka nasional.

Rata-rata angka IPG Jatim dalam rentang 2012-2020 adalah 90,63. Artinya ada ketimpangan pembangunan dengan rata-rata sebesar 9,37 persen yang dialami perempuan Jatim dalam sembilan tahun tersebut dibandingkan kaum laki-laki. Daerah dengan kategori administratif kota yaitu Kota Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo merupakan tiga daerah dengan IPG tertinggi (lebih setara) di 2020 (Grafik 5). Sementara, Sumenep, Jember, dan Pacitan adalah daerah dengan IPG terendah di 2020. Hal ini mengindikasikan perempuan yang dekat dengan modernitas dan episentrum kekuasaan dan produksi kebijakan akan mengalami kesetaraan pembangunan yang lebih tinggi.

Dilihat dari perubahan dari 2019 ke 2020 di saat pandemi Covid-19 terjadi, dampaknya bervariasi terjadi di kota dan kabupaten Jatim. Sampang menampilkan kinerja yang cukup mengejutkan (Grafik 6). Peningkatan angka IPG-nya tertinggi secara berbeda dengan besaran 0,71 poin di saat daerah-daerah lain banyak yang

---

<sup>22</sup> Adnan, G., & Amri, K. "Pemberdayaan Gender, Pendapatan Perempuan, dan Penurunan Kemiskinan: Bukti Data Panel dari Kawasan Barat Indonesia". *Media Ekonomi*, Vol. 28, 2020.

<sup>23</sup> Oyekanmi, A.A., & Moliki, A.O. "An Examination of Gender Inequality and Poverty Reduction in Ogun State Nigeria". *Journal of Sustainable Development in Africa*. Vol. 23, 2021.

turun dan yang tertinggi kedua hanya dengan besaran 0,45 poin (Mojokerto). Di 2019, Sampang berada nomor tiga terendah dengan besaran IPG 84,79. Di 2020, Sampang menduduki nomor lima terendah dengan angka IPG 85,50. Penurunan tertinggi adalah Kota Blitar dan Ngawi dengan besaran masing-masing yaitu -0,34 dan -0,33 poin.

Bagaimana aspek keterbangunan manusia dan keadilan gender mempengaruhi tingkat kemiskinan Jatim dalam rentang 2012-2020? Regresi variabel IPM Laki-laki dan IPM Perempuan menunjukkan bahwa model terbaik adalah FEM (Tabel 2). Model variabel IPM Laki-laki berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan signifikansi 1 persen, koefisien = -2,677, dan  $R^2 = 0,698$ . Artinya, kenaikan 1 persen IPM Laki-laki di Jatim akan menurunkan kemiskinan sebesar 2,677 persen, dan begitu pula sebaliknya. Model ini menjelaskan 69,8 persen variasi tingkat kemiskinan di Jatim. Sementara, untuk variabel IPM Perempuan, dengan tingkat signifikansi 1 persen, koefisien -2,022, dan  $R^2 = 0,669$ , mengartikan bahwa 1 persen kenaikan pada variabel ini akan menurunkan kemiskinan sebesar 2,022 persen, begitu pula sebaliknya. Model ini menjelaskan variasi tingkat kemiskinan di Jatim sebesar 66,9 persen.

Temuan ini memperkuat temuan oleh Sari, Rasyid, dan Senen (2020) di Jatim menggunakan data panel 2011-2017<sup>24</sup>, Lestari di Lampung (2017) menggunakan data panel 14 kota/kabupaten dalam rentang 2011-2015<sup>25</sup>, dan Prasetyoningrum dan Sukmawati (2018) di tingkat nasional yang menggunakan data panel nasional 33 provinsi dalam rentang 2013-2017 yang memiliki kesimpulan yang sama<sup>26</sup>. Temuan ini berbeda dengan kesimpulan kajian Milla dan Rofi (2013)<sup>27</sup>.

Membandingkan hasil regresi dari kedua variabel ini di mana variabel IPM laki-laki lebih tinggi angka koefisien dan  $R^2$ -nya dibandingkan IPM Perempuan,

---

<sup>24</sup> Sari, I.P, Rasyid, A.H.A., & Senen. "Pengentasan Kemiskinan di Jawa Timur dengan Pendekatan Pembangunan Manusia". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 22, 2020.

<sup>25</sup> Lestari, R.P., "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015". Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung. 2017.

<sup>26</sup> Prasetyoningrum, A.K., & Sukmawati, U.S., "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia". *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 6, 2018.

<sup>27</sup> Milla, W.U., & Rofi, A. "Perubahan Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada Pra dan Era Otonomi Daerah". *Jurnal Bumi Indonesia*. Vol. 2, 2013.

apakah artinya bahwa pembangunan kedua gender setara atau tidak timpang dan bahkan keterbangunan kaum laki-laki lebih besar pengaruhnya dan lebih menentukan terhadap tingkat kemiskinan di Jatim dibandingkan keterbangunan kaum perempuan (antitesis dari konsep feminisasi kemiskinan)? Perbedaannya sangat tipis. Perbedaan koefisiennya hanya sebesar 0,655 dan  $R^2$ -nya hanya sebesar 0,029.

Temuan-temuan selanjutnya akan menjawabnya. Pertama, pada Tabel 3 hasil uji variabel IPG ( $\ln\_ipg$ ) terhadap angka kemiskinan ( $\ln\_ipg$ ) menunjukkan hasil yang signifikan pada  $\alpha$  1 persen dengan koefisien berarah negatif -4,732,  $R^2 = 0,335$ , dan uji F yang juga signifikan dengan  $\alpha$  1 persen. Artinya, kenaikan 1 persen IPG akan menurunkan kemiskinan sebesar 4,732 persen dan variasi variabel independen secara simultan menjelaskan variasi variabel independen sebesar 33,5 persen. Temuan ini berbeda dengan temuan kajian oleh Walid dan Pratama (2020) di Jateng bahwa IPG tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan<sup>28</sup>. Besaran koefisien IPG yang sebesar - 4,732 lebih besar dibandingkan koefisien IDG, IPM Laki-laki, dan IPM perempuan yang masing-masing sebesar -0,502, -2,677, dan -2,022. Dapat disimpulkan bahwa isu ketimpangan pembangunan gender harus menjadi perhatian utama (*top concern*) dalam konteks pembangunan manusia dan agenda pengentasan kemiskinan di Jatim. Kesetaraan gender merupakan salah satu faktor kunci untuk mengentaskan kemiskinan di Jatim.

Kedua, dari hasil uji T (Tabel 4) yang membandingkan angka IPM Laki-laki dan IPM Perempuan semua kota dan kabupaten Jatim dalam rentang 2012-2020 (minus 2016) menunjukkan ada perbedaan rata-rata sebesar 7,2 poin dengan hasil uji beda yang signifikan pada  $\alpha$  1 persen ( $T = 14,932$ ,  $DF = 549,74$ , dan  $p\text{-value} = 0,000$ ). Artinya, terdapat perbedaan rata-rata antara kedua variabel tersebut. Keterbangunan antara laki-laki dan perempuan dalam rentang waktu tersebut terdapat ketimpangan. Rata-rata IPM Laki-laki sebesar 73,81 sementara rata-rata IPM Perempuan sebesar 66,59. Artinya, ada ketimpangan keterbangunan gender yang sebesar 7,22 di mana kaum perempuan yang tertinggal.

---

<sup>28</sup> Walid, & Pratama, B.R. "Analysis of Gender Inequality in Poverty Reduction Program". *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 4, 2020.

Terakhir, berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan yang menyangkut dimensi pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, air bersih, telekomunikasi, dan ekonomi 2019 (Tabel 5), hanya pada indikator persentase rumah dengan luas lantai > 7,2 m<sup>2</sup> per kapita menurut jenis kelamin kepala keluarga dan pengeluaran per kapita sebulan menurut jenis kelamin kepala keluarga (ribu Rp), kaum perempuan yang lebih besar. Dari berbagai data dan analisis ini dapat kita simpulkan bahwa kemiskinan di Jatim berwajah perempuan bahkan sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Feminisasi kemiskinan terjadi di provinsi ini. Alisjahbana dan Pitriyan (2016) berdasarkan hasil kajian mereka menyatakan bahwa modal SDM perempuan dan interaksinya dengan partisipasi komunitas meningkatkan kemungkinan rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan. Membuat perempuan Jatim berdaya dan aktif secara sosio ekonomi begitu penting untuk mereduksi unsur feminisme pada wajah kemiskinan<sup>29</sup>.

***Pandemi Covid-19: Disrupsi Upaya Pengarusutamaan Gender, Multiple Pandemics, dan Feminized Pandemics***

Pandemi Covid-19 membawa berbagai tantangan dan konsekuensi upaya pembangunan secara global. Tidak terkecuali halnya dengan upaya pemberdayaan dan pembangunan gender. Merupakan sebuah urgensi untuk mendiagnosis bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap berbagai indikator keberdayaan dan keterbangunan manusia terkhusus kaum perempuan sebagai proksi wajah kemiskinan.

Berbicara mengenai kerentanan—yang terkait langsung dengan keterdampakan—perempuan lebih rentan terhadap pandemi Covid-19. Secara fisiologis dan psikologis perempuan menghadapi menstruasi dan sindrom pramenstruasi yang mempengaruhi imunitas dan kestabilan emosi. Berbicara takdir gender, perempuan adalah gender yang mengandung dan melahirkan anak. Tradisi budaya atau takdir alam menempatkan perempuan yang dominan dalam mengurus anak dan melakukan pekerjaan rumah yang sebenarnya lebih melelahkan dibandingkan pekerjaan laki-laki di luar secara umum (Chairani, 2020). Faktor kelelahan dan daya tahan tubuh yang turun memberi peluang lebih lebar untuk virus menang dan bersarang di dalam tubuh. Perserikatan Bangsa-bangsa (2020)

---

<sup>29</sup> Alisjahbana dan Pitriyan (2016)

menyatakan bahwa bahkan sebelum pandemi, durasi jam kerja perempuan pada pekerjaan mengurus rumah dan anak yang tak berupah (*unpaid care and domestic work*) tiga kali lipat lebih lama dibandingkan laki-laki bekerja di pekerjaan mereka yang dibayar di luar rumah. Kasus KDRT menampilkan wajah perempuan sebagai korban dominan. Bagi perempuan kepala keluarga (*single parent*), pekerjaan/aktivitas harian menjadi berlipat dikarenakan harus mengurus rumah dan anak, bekerja, dan ditambah dengan perihal kompleks dan menantang ketika anak-anak belajar dari rumah dan menggantikan peran guru di sekolah dan ketika lebih intens bersama suami yang bekerja dari rumah.

Data Sakernas (BPS, 2019) menunjukkan dua dari beberapa sektor yang paling terkena dampak pandemi Covid-19 di Jatim adalah (1) penyediaan akomodasi dan makan minum dan (2) jasa pendidikan<sup>30</sup>. Dua sektor ini adalah di mana pekerja perempuan lebih banyak persentasenya dibandingkan laki-laki, yaitu 63,5 persen dan 58,76 persen. Begitu pula halnya dengan jenis pekerjaan. Tenaga usaha penjualan dan jasa merupakan dua jenis pekerjaan di Jatim pada tahun 2019—sebelum pandemi Covid-19 terjadi—di mana perempuan lebih banyak persentase pekerjanya dibandingkan laki-laki, yaitu 55,2 persen dan 58,96 persen. Dua jenis pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling terdampak akibat dari pembatasan mobilitas dan interaksi sosial pandemi Covid-19. Hal ini membawa konsekuensi kerentanan ekonomi atas pandemi Covid-19 pada perempuan berkadar tinggi. Hal ini mencakup mengenai ketenagakerjaan, pengeluaran per kapita, keberdayaan gender, dan keterbangunan gender. Kajian Gani (2021) menyimpulkan bahwa pembatasan sosial menyebabkan penurunan penghasilan keluarga yang kemudian berdampak pada kemiskinan Indonesia<sup>31</sup>.

Dalam bidang kesehatan, jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan Jatim—mereka yang berhadapan setiap hari dengan virus—lebih banyak dari kaum perempuan<sup>32</sup>. Dokter perempuan dan perawat perempuan Jatim masing-masing sebanyak 52 persen dan 63 persen. Belum lagi kita bicara bidan, tenaga *frontliner*

---

<sup>30</sup> BPS (2019)

<sup>31</sup> Gani, I. "Poverty of Women and the Covid-19 Pandemic in Indonesia". Budapest International Research and Critics Institute-Journal. Vol. 4, 2021.

<sup>32</sup> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2021. *Profil Kesehatan Jawa Timur 2020*. Surabaya: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

rumah sakit, dst. yang biasanya diisi oleh pekerja perempuan. Laporan PBB (2020) menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang terinfeksi Covid-19 di Spanyol dan Italia, 72 persen dan 66 persennya adalah perempuan<sup>33</sup>.

Dari sisi dampak, tingkat positif Covid-19 perempuan Jatim sebesar 52,2 persen<sup>32</sup>. Angka ini lebih banyak dibandingkan tingkat positif laki-laki yang hanya sebesar 47,8 persen. Hal yang sangat erat berkaitan dengan isu gender dan korban Covid-19 adalah anak-anak. Menurut rilis data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, hingga 8 Agustus 2021 sudah ada 5.733 anak yang menjadi yatim/piatu/yatim piatu karena meninggalnya orang tua mereka karena Covid-19<sup>34</sup>.

Menurut Samudra dan Setyonaluri dalam sebuah laporan kebijakan kerjasama UNESCO Jakarta dan Lembaga Demografi UI (2020), kaum perempuanlah—terutama perempuan kepala keluarga—yang mengalami dampak paling berat dengan adanya pembatasan gerak sosial melalui penutupan sekolah. Pekerjaan domestik rumah tangga perempuan dan keharusan mencari sumber penghidupan bagi kepala keluarga perempuan mengeskalasi ketika anak-anak mereka harus diurus lebih di rumah karena kebijakan sekolah daring. Belajar (anak) dan bekerja (suami dan/atau istri) dari rumah terbukti di banyak penelitian global, pemberitaan media massa, dan percakapan media sosial menaikkan tingkat stres dan KDRT terhadap perempuan. Dapat dibenarkan kalau dikatakan bahwa perempuan menghadapi pandemi ganda/berlipat/bayangan (*double/multiple/shadow pandemic*)<sup>35</sup>.

Penelitian global terkait isu pandemi ganda atau berlipat di mana perempuan mengalami KDRT di masa karantina (*lockdown*) pandemi Covid-19 di antaranya di Italia<sup>36</sup> dan di Cina<sup>37</sup>. Perserikatan Bangsa-bangsa menyebutnya sebagai pandemi bayangan (*shadow pandemic*) dan mengeluarkan laporan bahwa selama masa

---

<sup>33</sup> PBB (2020)

<sup>34</sup> “Sebanyak 5.733 Anak di Jawa Timur Menjadi Yatim Piatu Karena Covid-19”, <https://nasional.tempo.co/read/1492703/sebanyak-5-733-anak-di-jawa-timur-menjadi-yatim-piatu-karena-covid-19>, diakses tanggal 15 Agustus 2021.

<sup>35</sup> Samudra, R.R., & Setyonaluri, D. “Inequitable Impact of Covid-19 in Indonesia: Evidence and Policy Response”. UNESCO & Lembaga Demografi UI., 2020.

<sup>36</sup> Bellizzi, S., dkk. “Violence against women in Italy during the COVID-19 pandemic”. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*. Vol. 154, 2021.

<sup>37</sup> Zhang H., “The Influence of the Ongoing COVID-19 Pandemic on Family Violence in China”. *Journal of Family Violence*. Published Online, 2020.



karantina, terjadi peningkatan kasus KDRT sebesar 30 persen di Perancis, 25 persen di Argentina, 30 persen di Siprus, dan 33 persen di Singapura. Di Indonesia, survei melalui daring dan telepon yang dilakukan oleh Sastiono dkk. (JPAL, 2020) menyimpulkan bahwa 41,93 persen responden mengalami peningkatan frekuensi kekerasan (*abuse*) selama pandemi—terdapat selisih 2,46 persen perempuan mengalami lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Di Jatim, berdasarkan rilis data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dikutip dari laman resmi Diskominfo Provinsi Jatim, sudah hampir 700 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jatim hingga 16 Juli 2020. Sementara di 2019, total angka setahunnya saja sebesar 900 kasus. Artinya dalam setengah tahun saja di 2020, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sudah mencapai 78% dari jumlah satu tahun 2019. Angka perceraian di 2020 juga meningkat dengan kenaikan hingga September saja sudah 55.747 kasus. Sementara di 2019 hanya terdapat 8.303 kasus (6,8 kali lipat dalam 9 bulan)<sup>38</sup>.

Bagaimana dampak pandemi terhadap tingkat kemiskinan, keberdayaan, keterbangunan, dan kesetaraan gender di Jatim? Berdasarkan hasil uji T pada Tabel 6 yang membandingkan angka rata-rata lima variabel yaitu angka kemiskinan, IDG, IPM Laki-laki, IPM Perempuan, dan IPG semua kota/kabupaten Jatim antara tahun 2019 dengan 2020, menghasilkan variabel kemiskinan, IPM Laki-laki, dan IPM Perempuan mengalami kenaikan signifikan pada *alpha* 5 persen. Kenaikan IPM Perempuan lebih besar dibandingkan IPM Laki-laki yang masing-masing sebesar 0,19 dan 0,15 (selisih 0,04). Sementara variabel IDG dan IPG walaupun naik, tetapi tidak signifikan. Dapat kita simpulkan bahwa keterbangunan kualitas manusia kedua gender mengalami kenaikan di mana perempuan lebih akseleratif tetapi tidak diikuti secara signifikan dengan kenaikan keberdayaan perempuan dan penurunan ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Kajian oleh Ahinkorah dkk. (2021) di Sub-Sahara Afrika hampir senada dengan temuan penelitian ini di

---

<sup>38</sup> “Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Jatim Masih Tinggi”, <http://kominformojatimprov.go.id/read/umum/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jatim-masih-tinggi>, diakses tanggal 15 Agustus 2021.

mana pandemi Covid-19 justru semakin memperlebar jurang ketimpangan keberdayaan dan keterbangunan antara laki-laki dengan perempuan<sup>39</sup>.

Kenaikan angka IPM Perempuan Jatim pada 2020 dapat ditelusuri dari indikator-indikator kompositnya, yaitu angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita (PPK). Angka harapan hidup perempuan naik menjadi 73,27 di 2020 ketika di 2019 sebesar 73,15. Harapan lama sekolah perempuan naik menjadi 13,19 di 2020 setelah di 2019 sebesar 13,15. Rata-rata lama sekolah naik menjadi 7,3 setelah di 2019 sebesar 7,04. Terakhir, pendapatan per kapita (d disesuaikan) perempuan per tahun, malah turun dari Rp10,14 juta di 2019, menjadi Rp9,98 juta di 2020. Artinya, kenaikan angka IPM Perempuan Jatim di 2020 disebabkan oleh tiga indikator AHH, HLS, dan RLS. Dapat disimpulkan bahwa harapan untuk hidup, harapan untuk berkembang, dan upaya/kemampuan untuk berkembang perempuan Jatim tidak berubah pada masa pandemi Covid-19, setidaknya dalam durasi 6 bulan antara kasus pertama Covid-19 di Jatim dengan rilis data BPS di sekitaran bulan September. Namun, kualitas ekonomi untuk bertahan hidup perempuan mengindikasikan ada bahaya. Kajian Meilianna dan Purba (2020) menyebutkan bahwa walaupun angka PHK pekerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki—14,2 persen berbanding 16,7 persen—tetapi perubahan pendapatan pekerja untuk kelompok yang akhirnya tidak ada pendapatan sama sekali setelah PHK lebih tinggi pada kaum perempuan dengan angka perbandingan 15,8 persen untuk perempuan dan 14,7 persen untuk laki-laki. Faktor ekonomi lebih berperan dalam penyintasan (*survival*) jangka pendek mengingat ia masalah perut dan keselamatan jiwa di tengah pengeluaran untuk memelihara kesehatan semakin tinggi di masa pandemi Covid-19. Situasinya, kaum perempuan lebih dalam bahaya dibandingkan kaum laki-laki<sup>40</sup>.

Dari berbagai data dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 adalah sebuah disrupsi bagi upaya pengarusutamaan gender di Jatim. Perempuan adalah kaum yang paling berisiko, rentan terdampak, dan terbukti paling menjadi korban secara multidimensional di Jatim, baik dalam hal ketenangan

---

<sup>39</sup> Ahinkorah, B.O., dkk. "COVID-19 Pandemic Worsening Gender Inequalities for Women and Girls in Sub-Saharan Africa". *Frontiers in Global Women's Health*. Vol. 2, 2021.

<sup>40</sup> Meilianna dan Purba (2020)

batin, kebahagiaan hidup, kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, kesehatan, bahkan keselamatan jiwa.

### **Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan**

Penelitian ini dalam upaya untuk mengeksplorasi dan menginvestigasi potret dan relasi isu kemiskinan dan gender di Jawa Timur. Selain itu, kajian ini juga ingin mengungkap bagaimana pandemi Covid-19 yang terjadi secara global berpengaruh terhadap isu kemiskinan dan gender di Jawa Timur. Pemilihan topik gender dikarenakan selama ini diskursus mengenai kemiskinan lebih banyak pada topik-topik yang berkaitan dengan kinerja ekonomi makro, ketenagakerjaan, atau pembangunan manusia secara umum. Diskursus mengenai gender dalam berbagai kajian sifatnya masih sebatas mikro dan kontekstual melalui berbagai studi kasus. Dibutuhkan pandangan yang lebih luas (*broader view*) untuk bisa melihat potret gender dan relasinya terhadap dinamika kemiskinan. Terlebih dalam konteks per daerah apakah provinsi atau tingkat kota/kabupaten, kajian terkait gender dalam lensa besar masih jarang, termasuk di Jawa Timur.

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, feminisasi kemiskinan (*feminization of poverty*) terjadi di Jatim. Hal ini dibuktikan oleh signifikannya pengaruh IDG terhadap tingkat kemiskinan dengan arah berlawanan melalui uji regresi. Semakin berdaya perempuan, semakin turun angka kemiskinan. Hal ini dibuktikan pula oleh variabel keterbangunan perempuan berupa IPM Perempuan yang signifikan dengan arah yang juga berlawanan. Semakin terbangun perempuan, semakin menurun angka kemiskinan. Walaupun, pengaruh IPM Laki-laki yang lebih besar. Namun, perbedaannya sangatlah tipis. Hal ini diperkuat dengan signifikannya variabel IPG yang sebenarnya mewakili ketimpangan pembangunan gender antara laki-laki dengan perempuan (rasio IPM Perempuan dibagi rasio IPM Laki-laki). Variabel IPG signifikan dengan arah berlawanan pula dan bahkan dengan koefisien yang paling besar yaitu di kisaran delapan kali lipat dari IDG dan dua kali lipat dengan IPM kedua gender. Artinya, jauh lebih penting memastikan kesetaraan distribusi luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) ‘mesin-mesin’ pembangun kesejahteraan dalam berbagai dimensi dan konteks saat ini, dibandingkan meningkatkan kapasitas (*upgrading*) mesin-mesin tersebut yang bisa

jadi hanya memperlebar jurang ketimpangan antara kerterbangunan dan keberdayaan laki-laki dan perempuan karena algoritma sosial, ekonomi, politik, hukum, dan kebijakan mesin-mesin tersebut diatur/teratur (*set*)—sengaja atau tidak sengaja karena ketidaktahuan dan ketidaksadaran—seperti sejauh ini.

Feminisasi kemiskinan dibuktikan pula dengan signifikannya uji beda yang menguji perbedaan rata-rata IPM Laki-laki dan IPM Perempuan semua kota dan kabupaten Jatim dalam rentang 2012 hingga 2020. Hasil pengujian signifikan di mana terdapat perbedaan rata-rata IPM antara kedua gender. Feminisasi kemiskinan dibuktikan pula oleh potret indikator-indikator kesejahteraan antara dua gender di 2019. Perempuan hanya lebih baik pada dua variabel yaitu luas lantai rumah di atas 7,2 meter persegi (dalam konteks kasus sebagai kepala keluarga) dan pengeluaran per kapita per bulan menurut jenis kelamin. Sementara, di belasan variabel lain, kondisi kaum perempuan tidak lebih baik.

Kesimpulan kedua, tidak hanya feminisasi kemiskinan yang terjadi, tetapi juga feminisasi pandemi (*feminization of pandemic*) di Jatim di masa pandemi Covid-19. Kesimpulan ini diperoleh dari melihat data dan fakta di mana yang paling rentan dan paling banyak menjadi korban dari pandemi ini adalah kaum perempuan. Dalam konteks kerentanan, sektor ekonomi dan jenis pekerjaan yang paling terdampak diisi lebih banyak oleh pekerja dengan jenis kelamin perempuan. Dari sisi mereka yang menghadapi virus di garis terdepan, persentase pekerja perempuan juga lebih banyak. Dari sisi takdir fisiologis, psikologis, dan tradisi pengurusan rumah tangga dan anak, perempuan lebih menanggung beban yang lebih berat.

Dalam konteks korban dan keterdampakan, dari dimensi kesehatan, korban positif Covid-19 Jatim lebih banyak perempuan. Dari dimensi kehidupan internal rumah tangga, kaum perempuan dihadapkan dengan kasus kekerasan rumah tangga, perceraian, dan kematian ibu yang meningkat. Dari sisi keberdayaan dan kesetaraan dengan laki-laki, perempuan tidak dihadapkan dengan kenyataan peningkatan keduanya di tengah tensi kemiskinan yang meningkat. Perempuan tidak hanya mengalami pandemi tunggal (Covid-19), tetapi sudah ganda (*double*), berlipat (*multiple*), atau bayangan lain (*shadow*) karena konsekuensi dan efek domino dari pandemi Covid-19 beserta respons kebijakan dan sosial yang mengikutinya. Pandemi ganda, berlipat, atau berbayangan lain yang dihadapi oleh perempuan ini

membentuk pandemi Covid-19 yang semakin menampilkan wajah perempuan. Feminisasi pandemi (*feminization of pandemic*) itu terjadi di Jatim. Persis seperti wajah awet mudanya terdahulu yang selama ini masih nampak di mana-mana, yaitu kemiskinan.

Temuan dan kesimpulan penelitian ini membawa berbagai implikasi kebijakan. Pertama, pemerintah dan masyarakat sipil perlu memastikan bahwa keamanan diri dari Covid-19 dan ketenangan jiwa kaum perempuan terkhusus mereka yang bekerja pada lini terdepan penanganan korban, terjaga. Kedua, pemerintah dan masyarakat sipil sudah harus gerak cepat untuk memastikan daya beli kaum perempuan terjaga, meningkat, dan berkelanjutan (*sustainable*) melalui program-program pemberdayaan ketenagakerjaan perempuan yang berbeda dari sekedar bantuan sosial. Hal ini mengingat waktu untuk pulih secara ekonomi tidak cepat dan lebih lama pada perempuan. Ketiga, program pembinaan dan konseling kehidupan berumah-tangga harus lebih intens, masif, dan kreatif. Penyediaan organisasi sosial dan infrastruktur digital untuk pelaporan kasus KDRT perlu dibangun dan disediakan. Keempat, program belajar dari rumah harus dievaluasi dan dipastikan untuk tidak menambah beban berlebih para ibu dengan sebisa mungkin tidak menawar kualitas penyelenggaraan pendidikan. Kelima, pemerintah, sektor swasta, dunia pendidikan, dan masyarakat sipil sudah harus berpikir dan bertindak kreatif dan strategis untuk penanganan anak-anak yatim, piatu, atau keduanya untuk memastikan pendidikan berkualitas, kesejahteraan, dan keamanan diri dan jiwa mereka terjaga. Bantuan insidental hanya sekali dua kali tidaklah cukup. Program orang tua asuh, beasiswa pendidikan jangka panjang, dan penampungan dan pemantauan berkala mereka dalam suatu lembaga resmi pemerintah untuk proyek jangka panjang dengan suatu dana abadi atau anggaran '*multiyears*' adalah beberapa contoh yang dapat dipertimbangkan. Terakhir, untuk kebutuhan berbagai saran kebijakan di atas dan kebutuhan strategis pemerintah lainnya, pemerintah perlu memastikan koleksi dan pemeliharaan data komprehensif dan rinci korban Covid-19. Seleksi jenis data yang bisa dan perlu dibuka ke publik tentu harus dilakukan untuk tidak mengkhianati privasi warga negara. Karena kita hanya bisa mengelola apa yang bisa kita 'baca' dan kita ukur.

Berikut saran kajian ini untuk kajian lebih lanjut. Pertama, perlu dibuat kajian untuk mengcluster kota dan kabupaten di Jatim atau daerah lain yang memasukkan variabel-variabel kemiskinan dan gender untuk memudahkan pengambil kebijakan dan masyarakat sipil memotret situasi per daerah. Kedua, perlu banyak kajian dan aksi inovasi dalam berbagai disiplin ilmu terhadap berbagai usulan atau saran dalam implikasi kebijakan di atas.

### Referensi

- “Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Jatim Masih Tinggi”,  
<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jatim-masih-tinggi>, diakses tanggal 15 Agustus 2021.
- “Sebanyak 5.733 Anak di Jawa Timur Menjadi Yatim Piatu Karena Covid-19”,  
<https://nasional.tempo.co/read/1492703/sebanyak-5-733-anak-di-jawa-timur-menjadi-yatim-piatu-karena-covid-19>, diakses tanggal 15 Agustus 2021.
- Adnan, G., & Amri, K. “Apakah Pendapatan Perempuan Dapat Mengurangi Kemiskinan? Bukti Data Panel di Indonesia”. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, Vol. 8, 2020.
- Adnan, G., & Amri, K. “Pemberdayaan Gender, Pendapatan Perempuan, dan Penurunan Kemiskinan: Bukti Data Panel dari Kawasan Barat Indonesia”. *Media Ekonomi*, Vol. 28, 2020.
- Ahinkorah, B.O., dkk. “COVID-19 Pandemic Worsening Gender Inequalities for Women and Girls in Sub-Saharan Africa”. *Frontiers in Global Women’s Health*. Vol. 2, 2021.
- Azizah, E.W., Sudarti, & Kusuma, H. “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Per Kapita dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2, 2018.
- Bellizzi, S., dkk. “Violence against women in Italy during the COVID-19 pandemic”. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*. Vol. 154, 2021.

- Chairani I. “Dampak Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Gender di Indonesia”.  
*Jurnal Kependudukan Indonesia / Edisi Khusus Demografi dan COVID-19*,  
2020.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2021. *Profil Kesehatan Jawa Timur 2020*.  
Surabaya: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- Ede’o, A.Z., Ketebo, J.H., & Chala, B.W. “Feminization of multidimensional urban  
poverty in sub-Saharan Africa: Evidence from selected countries”. *African  
Development Review*, Vol. 32, 2020.
- Fajriyah, N., & Rahayu, S.P. “Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  
Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Menggunakan Regresi Data  
Panel”. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Vol. 5, 2016.
- Fukuda-Parr, Sakiko. “What Does Feminization of Poverty Mean? It Isn’t Just Lack  
of Income”. *Feminist Economics*, Vol. 5, 1999.
- Gani, I. “Poverty of Women and the Covid-19 Pandemic in Indonesia”. *Budapest  
International Research and Critics Institute-Journal*. Vol. 4, 2021.
- Gornick, J.C., & Boeri, N. “Gender and Poverty”. *The Oxford Handbook of the  
Social Science of Poverty*. Cetakan ke-1, Oxford University Press, New York,  
2016.
- Intaniswara, S., Analisis Pengaruh Kepala Rumah Tangga Perempuan terhadap  
Status Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.
- Lestari, R.P., Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran,  
Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi  
Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015. Skripsi.  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung, Lampung. 2017.
- Medeiros, M., & Costa, J. “Is There a Feminization of Poverty in Latin America?”.  
*World Development*, Vol. 36, 2008.
- Milla, W.U., & Rofi, A. “Perubahan Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur  
pada Pra dan Era Otonomi Daerah”. *Jurnal Bumi Indonesia*. Vol. 2, 2013.
- Nisak, S.S., & Sugiharti, L. “Gender Inequality and Women Poverty in Indonesia”.  
*International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Vol. 11, 2020.

- Oyekanmi, A.A., & Moliki, A.O. "An Examination of Gender Inequality and Poverty Reduction in Ogun State Nigeria". *Journal of Sustainable Development in Africa*. Vol. 23, 2021.
- Prasetyoningrum, A.K., & Sukmawati, U.S., "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia". *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 6, 2018.
- Rahutami, A.I., & Matitaputty, S.J. "Gender Issues of Poverty Alleviation in Indonesia. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics, and Law, Vol. 13, 2020.
- Samudra, R.R., & Setyonaluri, D. "Inequitable Impact of Covid-19 in Indonesia: Evidence and Policy Response". UNESCO & Lembaga Demografi UI., 2020.
- Sari, I.P, Rasyid, A.H.A., & Senen. "Pengentasan Kemiskinan di Jawa Timur dengan Pendekatan Pembangunan Manusia". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 22, 2020.
- Setiawati, A.K., & Setiawan. "Pemodelan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur dengan Pendekatan Ekonometrika Panel Spasial. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Vol. 1, 2012.
- Wahyudi, A. "Analisis Kinerja Program Jalin Matra untuk Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Jawa Timur". *Jurnal Cakrawala*. Vol. 14, 2020.
- Walid, & Pratama, B.R. "Analysis of Gender Inequality in Poverty Reduction Program". *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 4, 2020.
- Zamhari, J., Wisadirana, D., & Kanto, S. "Analisis Determinan Kemiskinan di Jawa Timur". *Wacana*. Vol. 18, 2015.
- Zhang H., "The Influence of the Ongoing COVID-19 Pandemic on Family Violence in China". *Journal of Family Violence*. Published Online, 2020.